

AKUNTABILITAS HUMANIS EKOSENTRISME: KONSTRUKSI HOLISTIK MENUJU KEBERLANJUTAN DI INDONESIA

I Gusti Ayu Agung Omika Dewi^{1*}, Eko Ganis Sukoharsono², Lilik Purwanti³, Aji Dedi
Mulawarman⁴

¹Universitas Pendidikan Nasional

^{2,3,4}Universitas Brawijaya

*E-mail: omikadewi@undiknas.ac.id

Diterima: 30/05/2024

Direvisi: 22/06/2024

DiPublikasi: 01/07/2024

<https://doi.org/10.22225/kr.16.1.2024.119-131>

Abstrak

Makalah ini bertujuan mengkonstruksi teori akuntabilitas dalam bingkai paradigma bahasa Habermas dipadukan dengan konsep Ekosentrisme. Konstruksi dilakukan karena paradigma bahasa Habermas dengan teori *Communicative Action*-nya bukan merupakan teori yang sepenuhnya tepat untuk menganalisis akuntabilitas jika dikaitkan dengan keberlanjutan. Akuntabilitas yang dianalisis dalam bingkai paradigma bahasa Habermas belumlah sepenuhnya holistik karena belum terdapat dimensi spiritual dan masih bersifat antroposentris yang memandang manusia sebagai pusat dari semua nilai dan menganggap alam sebagai alat untuk menciptakan nilai bagi manusia sehingga masih bisa memunculkan tindakan penindasan semena-mena terhadap alam. Sementara itu, Ekosentrisme dengan filsafat *Deep Ecology*-nya menjadikan manusia sebagai satu kesatuan dengan lingkungan alam yang membentuk suatu jaringan jaringan kehidupan (*the web of life*). Hasil konstruksi menemukan suatu formulasi teori baru yaitu teori Akuntabilitas Holistik yang dipandang dapat menganalisis akuntabilitas secara menyeluruh serta menghasilkan suatu model Akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme sebagai upaya menuju keberlanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme, Kontruksi Holistik, Keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Badai krisis multidimensional yang bersifat global saat ini sedang melanda dunia di segala aspek kehidupan tanpa kecuali yang terjadi akibat pencemaran lingkungan dan eksploitasi alam secara tidak terkendali. Penyebab utama dari berbagai krisis ini adalah kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak pro rakyat dan tidak ramah lingkungan, sehingga memberikan peluang kepada pelaku bisnis untuk melakukan eksploitasi secara semena-mena terhadap alam (Mulawarman, 2013). Sebagai akibatnya, lingkungan dan seluruh sumber daya alam yang melekat dieksploitasi dan dikorbankan oleh pelaku bisnis demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi besar-besaran dan keuntungan maksimal. Korporasi dipandang sebagai pihak terdepan dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam berbasis *high technology* yang bermuara pada isu perubahan iklim yang merupakan isu penting yang perlu dibahas di dalam G20 Summit (seperti disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Indonesia, 2021). Oleh sebab itu menjadi hal yang sangat wajar jika korporasi dituntut untuk lebih bertanggungjawab dalam memberikan perhatian pada upaya-upaya membangun masa depan dunia yang lebih baik (Sudana, 2014).

Krisis multidimensi global yang kemudian memicu terjadinya tuntutan agar perusahaan atau korporasi menjadi lebih bertanggungjawab, dalam konteks akuntansi dikenal sebagai akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan organisasi untuk mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan, dengan media

pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang harus diterapkan pada hampir semua sektor baik itu publik, swasta maupun *civil society* yang bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Paranoan, 2015). Namun, akuntabilitas perusahaan selama ini lebih banyak ditujukan pada aspek keuangan atau ekonomi yang dilakukan melalui mekanisme pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholder*. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai tuntutan agar perusahaan dapat mengarahkan akuntabilitasnya menjadi lebih luas dengan mempertimbangkan juga aspek sosial dan aspek lingkungan selain aspek ekonomi. Tanggung jawab perusahaan yang mengacu pada tiga aspek, yaitu, aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek lingkungan sering disebut dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Perusahaan yang menerapkan CSR dipercaya dapat mengarahkan akuntabilitasnya menjadi lebih luas yang tidak hanya mengedepankan kepentingan *shareholder*, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan *stakeholder*. Adapun mekanisme yang digunakan perusahaan untuk melaporkan berbagai dampak sosial dan lingkungan adalah *Sustainability Accounting* (SA) yang menghasilkan output berupa *Sustainability Report* (SR). SA secara konseptual dimaknai sebagai alat yang digunakan perusahaan agar terlihat lebih *sustainable*, dimana telah terjadi pergeseran dalam sistem akuntansi perusahaan yang beralih dari “*traditional accounting*” menjadi “*modern accounting*”, yang tidak saja berfokus pada informasi ekonomi, tetapi juga sosial, dan lingkungan. Oleh sebab itu, dengan adanya transformasi ini, aktivitas bisnis perusahaan pun mengalami perubahan dimana dampak yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan meliputi dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan. Kemunculan konsep CSR dan SA ini memicu perusahaan berlomba-lomba untuk mendeklarasikan dirinya sebagai perusahaan yang paling bertanggung jawab, paling peduli pada kondisi sosial dan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesan bahwa mereka adalah perusahaan yang “*accountable*” dan “*sustainable*”, dimana pengukuran yang digunakan mengacu pada konsep *Triple Bottom Line* (Perrini & Tencati, 2006).

Elkington (1998) mengemas konsep *Triple Bottom Line* (TBL) ini dalam tiga acuan kunci (3P), meliputi *profit*, *planet*, dan *people*, yang bermakna bahwa perusahaan harus mengarahkan akuntabilitasnya untuk tujuan keberlanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi (*profit*), lingkungan (*planet*), dan masyarakat (*people*). Perusahaan yang telah mengarahkan akuntabilitasnya pada konsep TBL, dipandang telah dapat menghubungkan antara strategi bisnis perusahaan dengan kerangka kerja keberlanjutan (*sustainability framework*) sehingga perusahaan tidak hanya berfokus pada dampak finansial (ekonomi) semata, namun juga lebih mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan menjadikan akuntabilitas sebagai sekedar “instrumen” yang dengan konsep 3P-nya mengubah “*accountability*” menjadi “*profitability*”. Terlebih lagi, jika konsep 3P ini hanya dijadikan semacam “pemulas bibir” atau “perona pipi” bagi perusahaan yang berusaha menutupi dampak negatif dari aktivitas bisnis yang dijalankannya demi meleagalkan segala upaya untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Akuntabilitas yang menitikberatkan pada laba maksimal (*profit maximization*) mengindikasikan bahwa kemakmuran (*wealth*) pada organisasi (perusahaan) hanyalah dinikmati oleh manajemen perusahaan dan para pemilik modal (*shareholders* atau *investors* dan *creditors*) serta cenderung mengorbankan *stakeholders* lainnya (*employee*, *customer*, *supplier*, *government*, dan *community*) termasuk juga lingkungan alam (Triyuwono, 2002). Kondisi ini tentu saja bertentangan dengan hakikat akuntabilitas yang sebenarnya, yakni berupaya mengakomodasi kepentingan *stakeholder* yang berbeda-beda. Akuntabilitas jika dikaitkan dengan keberlanjutan dalam praktiknya selama ini memang banyak mengacu pada konsep TBL yang dijabarkan melalui 3P yakni *Profit* (Ekonomi), *People* (Sosial), dan *Planet* (Lingkungan) serta dianalisis menggunakan teori-teori antara lain *Legitimacy Theory*. Jadi, bukankah konsep 3P dan teori *Legitimacy* yang digunakan untuk menganalisis akuntabilitas ini terkesan hanya sebagai kamufase untuk menyembunyikan “motif” yang sebenarnya dari perusahaan agar tetap terkesan “*accountable*” dan

“sustainable” dan memiliki citra positif di mata masyarakat? Segala persoalan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas perusahaan bukanlah dilandasi oleh rasa kesadaran dan tanggung jawab yang sebenarnya, melainkan masih mengandung motif dan *value* kapitalisme serta unsur ketidakadilan guna mewujudkan kemakmuran bagi *shareholders*. Situasi ini tentu saja akan menggagalkan upaya perusahaan untuk mewujudkan keberlanjutan yang sesungguhnya.

Sebuah pandangan kritis muncul untuk menyampaikan sebuah kontra narasi dengan menggunakan paradigma bahasa Habermas yang mengusulkan sebuah teori sebagai acuan untuk melakukan analisis terhadap interaksi sosial, yaitu *The Theory of Communicative Action*, yang meliputi: (1) interaksi sosial berdasarkan mekanisme sistem (*system mechanism*), dan (2) interaksi sosial berdasarkan kebutuhan sosial (*lifeworld*). Interaksi sosial yang termasuk dalam konsep mekanisme sistem, adalah aktivitas sosial yang dilakukan bukan karena kebutuhan, melainkan karena unsur keterpaksaan, dan terjadi tidak dalam suasana *communicative action* yang dipengaruhi oleh *steering media*, yaitu pertimbangan ekonomis (*media money*) serta peraturan atau regulasi (*media power*). Sementara itu, interaksi sosial yang dilakukan dalam konsep *lifeworld* adalah aktivitas sosial tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dan terjadi karena kebutuhan sosial dalam suasana *communicative action* (Sawarjuwono, 2005).

Menurut perspektif paradigma bahasa Habermas, suatu perusahaan (organisasi) tidak dapat berdiri sendiri tanpa melakukan interaksi sosial dengan stakeholder serta masyarakat sekitar. Interaksi sosial dilakukan oleh perusahaan melalui mekanisme akuntabilitas dengan menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Jika ditinjau dari pandangan *legitimacy theory*, terlihat bahwa interaksi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan stakeholders-nya adalah karena adanya unsur keterpaksaan yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem (*system mechanism*). Di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif paradigma bahasa Habermas, terlihat bahwa perusahaan melakukan interaksi sosial dengan stakeholders-nya, tidaklah hanya terbatas pada konsep mekanisme sistem saja, melainkan juga termasuk karena kebutuhan sosial dalam konsep *lifeworld*.

Penggunaan perspektif Habermas akan dapat menjelaskan peran manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial sebagai basis bertumbuhnya nilai-nilai humanis (Dewi, 2010). Namun, apakah paradigma bahasa Habermas sudah merupakan metode yang tepat untuk menganalisis akuntabilitas jika dikaitkan dengan keberlanjutan di Indonesia? Pertanyaan ini muncul karena akuntabilitas yang dianalisis dalam bingkai paradigma bahasa Habermas belumlah sepenuhnya holistik karena belum terdapat dimensi spiritual serta masih mengandung *value* kapitalisme. Padahal, karakteristik dan budaya bangsa Indonesia sangatlah identik dengan dimensi spiritualitas yang dipandang sebagai “jiwa” yang mendasari seluruh tingkah laku manusia. Di samping itu, akuntabilitas dalam bingkai paradigma bahasa Habermas dipandang masih bersifat antroposentris yang memandang manusia adalah pusat dari semua nilai dan alam sebagai alat untuk menciptakan nilai bagi manusia sehingga masih bisa memunculkan tindakan penindasan semena-mena terhadap alam. Adapun motivasi penulisan makalah ini adalah menyajikan pengembangan teori di bidang akuntabilitas dan keberlanjutan dengan mengacu pada pandangan paradigma bahasa Habermas dipadukan dengan konsep *deep ecology* berbasis Ekosentrisme. Penggunaan paradigma bahasa Habermas sebagai bingkai analisis akan dapat memberikan refleksi peran manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam melakukan interaksi dengan sesamanya.

Sementara itu, ekosentrisme mengacu pada etika lingkungan (Capra, 1996) dimana dalam artikelnya yang berjudul *Deep Ecology: A New Paradigm* menyatakan bahwa ekosentrisme adalah ekologi dalam (*deep ecology*) yang mempunyai cara pandang berbeda dengan antroposentrisme atau ekologi dangkal (*shallow ecology*). Antroposentrisme (*shallow ecology*) melihat manusia berada secara terpisah dengan alam atau di luar alam, dan menganggap alam hanya sebagai instrumen yang dapat menghasilkan nilai bagi manusia. Di

sisi lain, ekosentrisme (*deep ecology*) memandang manusia sebagai satu kesatuan dengan lingkungan alam, termasuk segala sesuatunya yang ada di alam. Ekosentrisme melihat dunia sebagai suatu jaringan fenomena yang saling ketergantungan dan saling terhubung secara fundamental, bukan sebagai suatu kumpulan objek-objek yang terisolasi. Ekosentrisme memandang manusia hanya sebagai salah satu bagian khusus dalam jaringan kehidupan (*the web of life*) dan mengakui nilai-nilai instrinsik dari semua makhluk hidup. Paradigma ekosentrisme (*deep ecology*) ini menyiratkan suatu etika berorientasi ekologi yang sesuai.

Konstruksi teori dan model akuntabilitas yang merupakan perpaduan antara paradigma bahasa Habermas dengan teori *Communicative Action*-nya dan konsep Ekosentrisme dengan filsafat *Deep Ecology*-nya dalam tataran paradigma posmodernisme sangatlah penting untuk dilakukan sebagai upaya menuju keberlanjutan. Seperti disampaikan Badria (2021) bahwa sebagian besar bisnis saat ini dikatakan “*unsustainable*”, karena masih bersifat kapitalistik, eksploitatif, dan meniadakan dimensi spiritualitas, sehingga perlu dilakukan dekonstruksi untuk mendorong keberhasilan penerapan keberlanjutan bisnis. Sesuai pemaparan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak ruang untuk dilakukan pengembangan isu-isu teoritis, praktis dan regulatif terkait konstruksi teori dan model akuntabilitas dalam upaya mendorong keberlanjutan di Indonesia. Konstruksi teori dan model akuntabilitas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: (1) secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntabilitas dikaitkan dengan keberlanjutan; (2) secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen perusahaan terkait praktik akuntabilitas; (3) secara regulatif, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya mengenai praktik akuntabilitas sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas secara sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya tertentu bagi individu atau organisasi yang dipercaya untuk mengelola sumber daya tersebut. Akuntabilitas memiliki keterkaitan erat dengan instrumen kegiatan pengendalian, yang bisa diformulasikan melalui aturan hukum atau perjanjian (Nizar, 2000). Akuntabilitas bagi setiap organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non profit sangatlah dibutuhkan, karena setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal dan eksternal organisasi. Akuntabilitas merupakan hak masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat (Gray, R., Jan B., 2006). Akuntabilitas digambarkan sebagai bentuk hak dan kewajiban organisasi sebagai wujud tanggung jawab atas keputusan atau tindakan sesuai dengan kontinjensi sosial, struktural dan interpersonal yang tertanam dalam konteks sosial budaya tertentu. (Lehman, 2005; Gelfand, 2004).

Akuntabilitas dari perspektif budaya memiliki sistem yang diharapkan dapat menciptakan kontrol, ketertiban dan kepastian dimana sifat dari sistem akuntabilitas tersebut sangatlah tergantung pada budaya yang ada. Akuntabilitas jika dilihat dari perspektif budaya dapat dijelaskan bahwa individu dalam budaya yang berbeda dididik untuk memahami harapan unik yang ada pada tingkat yang berbeda dalam sistem sosial, kekuatan harapan, serta konsekuensi terjadinya penyimpangan. Jadi, individu berupaya mengembangkan harapan untuk orang lain, kelompok, organisasi, serta masyarakat. Jika akuntabilitas dilihat dari perspektif budaya Indonesia yang majemuk dan sarat dengan nuansa spiritualitas sudah barang tentu memerlukan suatu acuan holistik agar praktik akuntabilitas yang dilakukan dapat mengakomodasi kepentingan stakeholder yang berbeda-beda serta masyarakat secara keseluruhan.

Keberlanjutan (*Sustainability*)

Permasalahan terkait keberlanjutan (*sustainability*) telah melalui perjalanan yang cukup panjang baik dalam tataran global termasuk Indonesia. Istilah terkait *sustainability* seperti *corporate sustainability*, *sustainable business*, *sustainability*, digunakan secara berbeda dalam literatur yang dianalisis, dimana: (1) beberapa literatur mengidentifikasi keberlanjutan dengan masalah lingkungan perusahaan; (2) beberapa penelitian menggunakan istilah keberlanjutan merujuk pada masalah keberlanjutan sosial perusahaan; dan (3) ada literatur yang mengidentifikasi keberlanjutan dengan pendekatan *Triple Bottom Line* terkait masalah sosial dan lingkungan serta keberlanjutan ekonomi (Montiel & Ceballos, 2014).

Szekely and Knirsch (2005) mendefinisikan keberlanjutan untuk bisnis sebagai “mempertahankan dan memperluas pertumbuhan ekonomi, nilai pemegang saham, prestise, reputasi perusahaan, hubungan pelanggan, dan kualitas produk dan layanan serta mengadopsi dan menjalankan praktik bisnis yang etis, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, membangun nilai bagi *stakeholders* dan memenuhi kebutuhan masyarakat terlayani”. Selanjutnya definisi keberlanjutan yang menyeimbangkan tiga pilar *corporate sustainability* (ekonomi, sosial, dan lingkungan) kemudian dijabarkan menjadi 10 dimensi keberlanjutan meliputi: (1) *economic growth*, (2) *shareholder value*, (3) *prestige*, (4) *corporate reputation*, (5) *customer relationships*, (6) *product quality*, (7) *ethical business practices*, (8) *sustainable jobs creation*, (9) *value creation for all the stakeholders*, dan (10) *attention to the need of the underserved*.

Markevich (2009) mengidentifikasi enam perspektif yang mencakup keberlanjutan, yaitu: kepatuhan terhadap peraturan, mitigasi tambahan, penyesuaian nilai, desain sistem keseluruhan, inovasi model bisnis, dan transformasi misi yang membantu perusahaan maju menuju keberlanjutan. Adapun cara untuk mencapai keberlanjutan adalah melalui integrasi empat mekanisme: (1) total kualitas pengelolaan lingkungan, (2) strategi bersaing ekologis yang berkelanjutan, (3) pertukaran teknologi dengan alam, dan (4) pengendalian dampak populasi perusahaan.

Marshall and Brown (2003) menyebutkan satu definisi menarik dari keberlanjutan organisasi yang "ideal" dari perspektif sistem, dimana organisasi digambarkan tidak akan menggunakan sumber daya alam lebih cepat daripada tingkat pembaruan, daur ulang, atau regenerasi sumber daya tersebut. Masih terdapat ambiguitas terkait definisi keberlanjutan, namun makalah ini mengacu pada definisi yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai kesepakatan sebagian besar ahli (Bansal, 2005; Hart, S. L., & Milstein, 2003).

Posmodernisme: Paradigma untuk Melakukan Kontruksi Holistik

Paradigma merupakan cara pandang kita terhadap dunia realita, atau ilmu (bahkan akuntansi) melalui asumsi fundamental tentang Tuhan, manusia, alam, realita, dan semesta (Kamayanti, 2020). Paradigma dapat dipahami sebagai alat untuk melihat realitas ilmu dan praktik akuntansi, sekaligus juga merupakan alat untuk tidak melihat, dimana harus disadari bahwa paradigma tetap akan berkembang dan berproses menuju kesempurnaan melalui proses dialektika (Triyuwono, 2000). Secara umum dalam dunia akuntansi dikenal empat paradigma, yaitu: *The Functionalist Paradigm*, *The Interpretive Paradigm*, *The Critical Paradigm*, dan *The Postmodernism Paradigm* (Muhadjir, 2000).

Makalah ini berupaya melakukan konstruksi terhadap teori akuntabilitas dalam kaitannya dengan keberlanjutan menggunakan pendekatan paradigma posmodernisme. Realitas dalam pandangan posmodernisme dijelaskan sebagai asumsi tentang penulis, pembaca, teks, subyek, sejarah, dan teori (Rosenau, 1992). Posmodernisme berpandangan bahwa tujuan perolehan kebenaran bukanlah perspektif tujuan utama ilmu. Oleh sebab itu, posmodernisme menolak teori karena teori mencerminkan kebenaran dan kebenaran dalam konteks ilmu sosial memiliki karakter yang sangat teoritikal. Kebenaran dalam

posmodernisme merupakan pluralitas, maka semua klaim monopolistik atas kebenaran ditentang habis oleh posmodernisme (Kamayanti, 2020).

Pendekatan Humanis: Paradigma Bahasa Habermas

Jurgen Habermas adalah seorang sosiolog Jerman yang mengusulkan teori yang dikenal dengan *The Theory of Communicative Action*, dimana terjadinya interaksi sosial sering dianalisis menggunakan teori. Teori ini berfokus pada peran bahasa dalam menyatukan semua aspek dari kehidupan sosial sehingga sering disebut sebagai paradigma bahasa. Pandangan Habermas menekankan pada struktur dominasi yang mengelilingi bahasa dan pengajaran sehari-hari. Habermas berpendapat bahwa struktur bahasa, hakikat dan penggunaannya menyediakan kunci yang dapat membuka banyak pikiran dalam bentuk fundamental pada formasi sosial yang berbeda (Burrell, 1979). Dengan melakukan implementasi suatu metodologi tertentu, penelitian yang dilakukan dalam perspektif paradigma bahasa Habermas tidak hanya berusaha menemukan pengetahuan (*uncover knowledge*), tetapi juga berusaha mengajukan suatu transformasi ke arah yang lebih baik melalui suatu proses penyadaran dan pencerahan.

Teori Habermas pada umumnya digunakan untuk menganalisis interaksi sosial yang dibedakan menjadi dua interaksi dasar yaitu: (1) interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem (*system mechanism*); dan (2) interaksi berdasarkan kebutuhan sosial (*lifeworld*). Interaksi sosial yang didasarkan pada mekanisme sistem terjadi karena adanya pengaruh sistem kehidupan sosial yang terstruktur dalam masyarakat. Interaksi sosial yang dipengaruhi mekanisme sistem bisa terjadi melalui norma-norma sosial, kesepakatan sosial, peraturan (regulasi) dan sebagainya. Di dalam konteks ini, interaksi sosial terjadi bukan karena kebutuhan (tidak dalam suasana *communicative action*), melainkan karena unsur keterpaksaan, meskipun pelaku mungkin tidak merasakan. Proses sosial yang terjadi disini dikatakan dipengaruhi oleh *steering media*. Terdapat dua *steering media* yang sangat berpengaruh dalam masyarakat yang secara bersama-sama dan tanpa dapat dipisahkan ikut mempengaruhi proses interaksi sosial, yaitu media *money* (pertimbangan ekonomis) dan media *power* (peraturan atau regulasi). Sementara itu, *lifeworld* dapat disederhanakan menjadi aktivitas suatu group sosial (masyarakat) yang terkoordinasi karena adanya proses harmonisasi, kesamaan tujuan, keinginan, harapan, serta tindakan lain yang selaras. Interaksi sosial yang termasuk dalam konsep *lifeworld* adalah aktivitas sosial yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dan terjadi dalam suasana *communicative action* (Sawarjuwono, 2005).

Interaksi sosial dalam dunia akuntansi dapat terefleksikan dari berbagai macam aktivitas, salah satunya adalah melalui praktik akuntansi. Jika dilihat dari perspektif paradigma bahasa Habermas, praktik akuntansi dapat digambarkan sebagai manifestasi dari pemikiran manusia, kepentingan, kebutuhan, motivasi dan keadaan yang melingkupinya (Sawarjuwono, 2005). Di dalam konteks bisnis, dapat kita lihat bahwa suatu organisasi bisnis atau perusahaan tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa adanya interaksi dengan para stakeholder serta masyarakat di sekitarnya. Salah satu cara perusahaan berinteraksi dengan *stakeholders*-nya adalah dengan melakukan praktik akuntabilitas kemudian dituangkan dalam bentuk AR maupun SR sebagai produk dari praktik akuntansi. Kebutuhan perusahaan dan *stakeholders*-nya dalam berinteraksi melalui AR atau SR sebagai media komunikasi terjadi mengikuti interaksi *lifeworld*.

Jika perusahaan mulai dihadapkan pada peraturan tertentu, terlebih lagi ada sanksi hukum yang mengikat, maka interaksi sosial yang terjadi adalah pada tingkatan mekanisme sistem (*system mechanism*). Interaksi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya dalam konteks ini dipengaruhi oleh *steering media*, baik media *power* (peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku) maupun media *money* (pertimbangan ekonomis). Jadi, dapat dikatakan bahwa pemilihan praktik akuntansi tertentu akan mengikuti proses sosial dalam interaksi sistem.

Pendekatan Ekosentrisme: *Deep Ecology* dan *Shallow Ecology*

Krisis multidimensional global yang terjadi dewasa ini pada dasarnya disebabkan oleh kesalahan pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam dan tempat manusia dalam ekosistem secara fundamental-filosofis. Kesalahan pemahaman ini selanjutnya disebut pandangan antroposentrisme (*shallow ecology*) yang melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam secara keseluruhan. Perspektif antroposentrisme yang menganggap manusia bukan merupakan bagian dari alam menyebabkan manusia tidak menyadari bahwa kerusakan ekologi adalah akibat pengelolaan lingkungan hidup yang terlalu bertumpu pada kepentingan manusia. Ekosentrisme (*deep ecology*) yang merupakan kebalikan dari antroposentrisme adalah suatu teori etika lingkungan yang memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologi, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Oleh sebab itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.

Paradigma *deep ecology* ini menyiratkan suatu bentuk etika berorientasi ekologi yang sesuai yang mengintegrasikan dimensi emosional, intelektual, dan spritual. Dimensi emosional berperan dalam membentuk manusia yang bermoral dan beretika untuk menjamin kualitas hidup manusia dari generasi ke generasi Dimensi intelektual mensyaratkan agar umat manusia mempelajari, meneliti, memahami dan menghargai alam lingkungannya secara terus menerus. Dimensi spritual berarti mempercayai bahwa sumber daya alam diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya karena berperan dalam mendukung kehidupan umat manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dalam Bingkai Paradigma Bahasa Habermas

Fenomena akuntansi yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep akuntabilitas yang akan dianalisis terkait bagaimana perusahaan berinteraksi dengan *stakeholders* serta masyarakat sekitar terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam bingkai paradigma bahasa Habermas. Perusahaan dalam mempraktikkan akuntabilitas biasanya akan dihadapkan pada *steering media (media money)* berupa pertimbangan ekonomis (misalnya pertimbangan terkait laba perusahaan) serta *steering media (media power)* berupa peraturan dan perundang-undangan secara internasional, nasional, maupun lokal yang mengatur tentang akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan suatu mekanisme bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan kemudian menuangkan segala aktivitas tersebut dalam laporan tahunan atau *Annual Report (AR)* atau melalui laporan sosial dan lingkungan secara terpisah yaitu laporan keberlanjutan atau *Sustainability Report (SR)*. SR merupakan suatu dokumen yang diterbitkan sebagai wujud akuntabilitas perusahaan dalam mempertanggungjawabkan dan mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan. Selain berinteraksi secara langsung dengan *stakeholders* dan masyarakat, AR maupun SR dapat dikatakan sebagai media utama bagi perusahaan untuk dapat berkomunikasi atau melakukan interaksi sosial dengan *stakeholders*-nya serta dengan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, AR dan SR merupakan suatu bentuk atau wujud akuntabilitas perusahaan yang disusun agar sedapat mungkin bisa mengakomodasi kepentingan *stakeholder* yang berbeda-beda serta berupaya memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Jika dianalisis dalam perspektif paradigma bahasa Habermas, dapat dilihat bahwa praktik akuntabilitas yang dilakukan perusahaan melalui interaksi sosial sebagai bentuk kebutuhan sosial adalah termasuk dalam konsep *lifeworld* karena terjadi dalam suasana tanpa paksaan (*communicative action*). Di dalam konteks

ini, praktik akuntabilitas dilakukan perusahaan sebagai wujud kesadaran dan kesungguhan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Sementara itu, praktik akuntabilitas perusahaan yang didominasi oleh pertimbangan ekonomis atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, jika dilihat dalam bingkai paradigma bahasa Habermas, adalah termasuk dalam konsep *system mechanism*. Di dalam konteks ini, interaksi sosial dilakukan karena adanya unsur keterpaksaan melalui *steering media*, yaitu media *money* (interaksi sosial yang berorientasi pada laba) dan media *power* (interaksi sosial yang berorientasi pada peraturan atau regulasi). Kedua jenis interaksi sosial ini tidak terjadi dalam suasana *communicative action*, karena diatur oleh adanya berbagai macam peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adapun peraturan yang dimaksud antara lain *Global Reporting Initiative (GRI) Standards* (internasional); Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara nasional; serta Peraturan Daerah (Perda) setempat (lokal).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa penggunaan paradigma bahasa Habermas sebagai bingkai analisis menekankan pada pemahaman bahwa praktik akuntabilitas perusahaan tidaklah hanya sebagai strategi untuk mendatangkan keuntungan ataupun sebagai upaya pemenuhan kewajiban semata, tetapi juga sebagai wujud kesadaran dan kesungguhan berdasarkan kebutuhan sosial untuk berinteraksi dengan stakeholder dan masyarakat. Penggunaan teori Habermas dalam penelitian akuntansi akan dapat merefleksikan peran manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial sebagai basis bertumbuhnya nilai-nilai humanis. Jadi, paradigma bahasa Habermas, diyakini dapat menjelaskan praktik akuntabilitas perusahaan melalui proses komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholders-nya* serta antara perusahaan dengan masyarakat ditinjau dari interaksi sosial. Dengan demikian praktik akuntabilitas yang dapat dianalisis dengan menggunakan teori Habermas dapat meliputi 3 jenis akuntabilitas, yaitu: (1) akuntabilitas karena pertimbangan ekonomis (Akuntabilitas Ekonomis); (2) akuntabilitas karena adanya peraturan atau regulasi (Akuntabilitas Regulatoris); (3) akuntabilitas karena kebutuhan sosial (Akuntabilitas Humanis).

Akuntabilitas dalam Perspektif Antroposentrisme vs Ekosentrisme

Akuntabilitas perusahaan yang dituangkan dalam bentuk AR maupun SR, sangatlah erat kaitannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan moralitas. Namun, praktik akuntabilitas tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi perusahaan karena sangatlah bergantung pada pimpinan puncak perusahaan. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi dan menjadikan akuntabilitas sebagai etos bisnis, maka akuntabilitas perusahaan akan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan moralitas. Begitu pula sebaliknya, jika orientasi pimpinan perusahaan hanya berkiblat pada kepentingan *shareholder (profit maximization)*, serta pencapaian prestasi pribadi, maka boleh jadi akuntabilitas perusahaan tidak akan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Di dalam konteks ini akuntabilitas yang dituangkan melalui AR maupun SR hanya akan dijadikan sebagai “kosmetik” untuk membuat AR atau SR-nya tampak mengkilap, disertai berbagai foto aktivitas sosial. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, informasi yang disajikan perusahaan dalam AR ataupun SR pada kenyataannya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya krisis multidimensi.

Namun, apakah prinsip-prinsip etika bisnis dan moralitas yang dijadikan sebagai acuan praktik akuntabilitas memang telah sesuai dengan esensi dari keberadaan akuntabilitas sebagai salah satu solusi dari krisis multidimensi?. Capra (1996) berpandangan bahwa krisis multidimensional tersebut sebenarnya bersumber pada kesalahan cara pandang manusia mengenai dirinya sebagai antroposentris sehingga melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya. Antroposentrisme adalah ekologi dangkal (*shallow ecology*) yang mempunyai cara pandang berbeda dengan ekosentrisme atau ekologi dalam (*deep ecology*). Antroposentris memandang manusia berada secara terpisah dari alam, dimana manusia dianggap bukan

merupakan bagian dari keseluruhan alam semesta. Sementara itu, ekosentrisme memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alam. Ekosentrisme ini menyiratkan suatu paradigma etika ekologi baru yang dipandang lebih sesuai untuk menganalisis akuntabilitas sosial dan lingkungan dibandingkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi, ekosentrisme bisa digunakan untuk mencari jalan terang bagi praktik akuntabilitas perusahaan agar bisa menyatu dengan alam guna mewujudkan keberlanjutan.

Konstruksi Teori Akuntabilitas Holistik

Interaksi sosial dalam dunia akuntansi dapat terefleksikan dari berbagai macam aktivitas, salah satunya adalah melalui praktik akuntansi. Jika dilihat dari perspektif paradigma bahasa Habermas, praktik akuntansi dapat digambarkan sebagai manifestasi dari pemikiran manusia, kebutuhan, kepentingan, motivasi, keadaan dan fenomena sosial yang melingkupinya (Sawarjuwono, 2005). Praktik akuntabilitas perusahaan yang terefleksi dalam AR ataupun SR merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang dihasilkan melalui proses interaksi sosial. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan perusahaan atau organisasi profit adalah untuk menghasilkan laba. Akan tetapi, mengingat kegiatan operasional perusahaan yang membawa dampak pada berbagai bidang kehidupan, maka akuntabilitas perusahaan hendaknya berupaya menyeimbangkan berbagai aspek baik ekonomi, sosial, lingkungan dimana aspek etika dan spiritualitas adalah sebagai acuan dari berbagai aktivitas perusahaan. Aspek etika dan spiritualitas dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting agar seluruh kegiatan perusahaan bisa sesuai dengan karakteristik dan budaya Indonesia tempat dimana perusahaan melaksanakan aktivitas bisnisnya.

Berdasarkan konstruksi yang dilakukan dalam bingkai paradigma bahasa Habermas dipadukan dengan konsep Antroposentrisme-Ekosentrisme dapat dikategorikan tiga model interaksi sosial menjadi tiga teori holistik yang digunakan untuk menganalisis praktik akuntabilitas, yaitu: (1) teori ekonomis-antroposentrisme jika interaksi sosial lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomis (*media money*) yang berpusat pada manusia; (2) teori regulatif-antroposentrisme jika interaksi sosial lebih banyak didasarkan pada ketaatan terhadap peraturan (*media power*) yang berpusat pada manusia; dan (3) teori humanis-ekosentrisme, jika interaksi sosial didasarkan pada kesadaran yang melebihi pertimbangan ekonomis (*media money*) maupun ketaatan terhadap peraturan (*media power*) dengan mengacu pada etika ekologi. Selanjutnya, ketiga teori tersebut dalam makalah ini disebut sebagai Teori Akuntabilitas Holistik yang digunakan untuk mengkonstruksi model akuntabilitas yang dikelompokkan menjadi: (1) akuntabilitas ekonomis-antroposentrisme, jika tujuan perusahaan lebih banyak didasarkan pada pandangan antroposentrisme yang mengarah pada *profit maximization*; (2) akuntabilitas regulatif-antroposentrisme, jika tujuan perusahaan lebih banyak didasarkan pada pandangan antroposentrisme yang mengarah pada ketaatan terhadap regulasi; (3) akuntabilitas humanis-ekosentrisme, jika tujuan perusahaan didasarkan pada pandangan ekosentrisme dengan mengacu pada etika ekologi sebagai wujud kesadaran dan kesungguhan karena perusahaan merasa sebagai bagian dari suatu jaringan kehidupan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat dijelaskan proses konstruksi yang dijabarkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Konstruksi Teori Akuntabilitas Holistik

Keterangan/ Kategori	Ekonomis- Antroposentrisme	Regulatif- Antroposentrisme	Humanis- Ekosentrisme
Model Interak Sosial	Teori Ekonomis-Antroposentrisme yang memandang bahwa interaksi sosial yang dilakukan perusahaan dengan <i>stakeholders</i> -nya melalui AR dan SR mengikuti konsep <i>system mechanism</i> yang terjadi dalam suasana <i>non-communicative action</i> karena adanya unsur keterpaksaan melalui pertimbangan ekonomis (<i>media money</i>) dengan mengacu pada kepentingan manusia.	Teori Regulatif-Antroposentrisme yang memandang bahwa interaksi sosial yang dilakukan perusahaan dengan <i>stakeholders</i> -nya melalui AR dan SR mengikuti konsep <i>system mechanism</i> yang terjadi dalam suasana <i>non-communicative action</i> karena adanya unsur keterpaksaan melalui ketaatan pada peraturan atau regulasi (<i>media power</i>) dengan mengacu pada kepentingan manusia.	Teori Humanis-Ekosentrisme yang memandang bahwa interaksi sosial yang dilakukan perusahaan dengan <i>stakeholders</i> -nya melalui AR dan SR mengikuti konsep <i>lifeworld</i> yang terjadi dalam suasana <i>communicative action</i> karena dilakukan berdasarkan kebutuhan sosial sebagai wujud kesadaran yang melebihi pertimbangan ekonomis (<i>media money</i>) dan ketaatan pada peraturan atau regulasi (<i>media power</i>) dengan mengacu pada nilai-nilai humanis dan etika ekologi yang menyeimbangkan suatu jaringan kehidupan.
Model Akuntabilitas	Akuntabilitas Ekonomis-Antroposentrisme yang lebih banyak berorientasi pada tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan.	Akuntabilitas Regulatif-Antroposentrisme yang lebih banyak berorientasi pada ketaatan pada peraturan atau regulasi.	Akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme sebagai suatu kearifan yang berupaya mengatur hidup selaras dengan alam dengan mengintegrasikan dimensi intelektual, spritual dan emosional.

Sumber: hasil konstruksi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga teori yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik akuntabilitas yang kemudian menghasilkan tiga model akuntabilitas. Jika ditelusuri secara mendalam dapat diketahui bahwa model akuntabilitas yang paling sesuai dengan karakteristik dan budaya bangsa Indonesia adalah Akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme yang dipandang dapat menghantarkan Indonesia menuju keberlanjutan.

Akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme: Menuju Keberlanjutan di Indonesia

Tuhan menciptakan alam semesta, jagat raya ini beserta segala isinya yang terdiri dari ribuan galaksi, miliaran bintang, triliunan planet, serta benda-benda angkasa lainnya yang tidak terhitung jumlahnya, termasuk bumi tempat dimana manusia hidup. Manusia sebagai makhluk Tuhan diciptakan hidup berdampingan dengan sesamanya, serta makhluk hidup lainnya yaitu hewan dan tumbuhan. Manusia sering disebut sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, karena pada hakikatnya manusia tidaklah dapat hidup sendiri dimana mereka perlu berinteraksi dengan sesamanya dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan umat manusia di bumi ini sangatlah kompleks dan memiliki keunikan sendiri-

sendiri. Setiap manusia akan memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat dan memaknai suatu fenomena kehidupan. Begitu pula dalam melakukan interaksi sosial dengan sesamanya, setiap manusia akan memiliki caranya masing-masing.

Jika dilihat dalam konteks perusahaan, interaksi sosial yang dituangkan dalam AR dan SR sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan dapat dilihat dalam tiga model interaksi sosial. Pertama, perusahaan yang selalu berorientasi pada untung dan rugi dalam berinteraksi, akan bermuara pada akuntabilitas Ekonomis-Antroposentrisme. Kedua, perusahaan yang selalu berorientasi pada ketaatan terhadap peraturan atau regulasi dalam berinteraksi akan bermuara pada akuntabilitas Regulatif-Antroposentrisme. Ketiga, perusahaan yang berpandangan bahwa interaksi dengan sesama makhluk hidup, dengan lingkungan alam, termasuk dengan benda mati merupakan suatu kebutuhan sosial karena perusahaan merasa sebagai bagian dari suatu sistem ekologi atau jaringan kehidupan akan bermuara pada akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme memang yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena akuntabilitas Ekonomis-Antroposentrisme dan akuntabilitas Regulatif-Antroposentrisme masih bisa membuat perusahaan terjebak dalam labirin kapitalisme sebagai biang keladi terjadinya krisis multidimensi. Sementara itu, akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme yang memandang bahwa dimensi intelektual, spritual dan emosional memiliki peran yang sangat penting dalam proses interaksi sosial dipandang dapat membebaskan perusahaan dari labirin kapitalisme sehingga perusahaan dapat memberikan kontribusi bagi keberlanjutan di Indonesia.

Keunikan Teori Baru

Makalah ini berupaya melakukan konstruksi terhadap teori yang digunakan untuk menganalisis praktik akuntabilitas yang pada akhirnya berhasil menemukan suatu formulasi teori baru yaitu teori Akuntabilitas Holistik. Teori Akuntabilitas Holistik dikategorikan menjadi tiga teori yang digunakan untuk menganalisis praktik akuntabilitas, meliputi: (1) teori ekonomis-antroposentrisme; (2) teori regulatif-antroposentrisme; dan (3) teori humanis-ekosentrisme. Teori Akuntabilitas Holistik sebagai hasil konstruksi dari teori *communicative action* Habermas dan Teori Antroposentrisme-Ekosentrisme, memiliki keunikan yaitu dipandang dapat menganalisis praktik akuntabilitas yang dilakukan perusahaan secara lebih menyeluruh atau holistik.

Jika dibandingkan dengan teori lama, yaitu teori Habermas dan teori Ekosentrisme, Teori Akuntabilitas Holistik ini, dapat digunakan untuk menganalisis dan mengkonstruksi model akuntabilitas yang dikelompokkan menjadi: (1) akuntabilitas ekonomis-antroposentrisme; (2) akuntabilitas regulatif-antroposentrisme; dan (3) akuntabilitas humanis-ekosentrisme. Mengingat berbagai macam ragamnya karakteristik dan budaya individu yang kemudian membentuk karakteristik dan budaya perusahaan, konstruksi teori dan model akuntabilitas ini sangatlah diperlukan untuk dapat melakukan analisis terhadap praktik akuntabilitas dari masing-masing perusahaan. Dari ketiga konstruksi model akuntabilitas yang ditemukan, model Akuntabilitas Humanis-Ekosentrisme dipandang paling sesuai dengan karakteristik dan budaya bangsa Indonesia sebagai upaya menuju keberlanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Ada banyak hal yang terlewat begitu saja dalam hidup ini, tanpa berhasil kita maknai. Pengalaman diri sendiri maupun orang lain serta fenomena alam yang bertaburan memang sudah selayaknya dipetik menjadi hikmah. Pengalaman terkait fenomena krisis multidimensi dengan berbagai macam permasalahannya tersebut hendaknya dapat dipetik hikmahnya, agar kehidupan di masa yang akan datang dapat menjadi lebih baik lagi. Sebagai upaya menciptakan masa depan yang lebih baik, konstruksi teori dan model akuntabilitas dipandang memiliki peran yang sangat penting untuk dijadikan acuan holistik bagi

perusahaan dalam melakukan praktik akuntabilitas. Melalui acuan teori dan model akuntabilitas yang tepat diharapkan perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keberlanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badria, N. E. G. S. dan L. P. (2021). Business sustainability and pentuple bottom line: Building the hierarchical pyramid of the pentuple bottom line. *Research in Business & Social Science IJRBS*, 10(3), 123–131.
- Bansal, P. (2005). Evolving sustainably: A longitudinal study of corporate sustainable development. *Strategic Management Journal*, 26, 197–218.
- Burrell, Gibson and Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organisational Analysis, Elements of the Sociology of Corporate Life. *England: Reprinted by Arena, Ashgate Publishing Limited*.
- Capra, F. (1996). *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. Anchor Books.
- Dewi, I. G. A. A. O. (2010). Dialektika dan Refleksi Kritis Realitas “Sustainability” Dalam Praktik Sustainability Reporting: Sebuah Narasi Habermasian. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 139–152.
- Elkington, J. (1998). Accounting For The Triple Bottom Line. *Measuring Business Excellence*, 2(3), 18–22.
- Gelfand, M. J., B. L. dan J. L. R. (2004). Culture And Accountability In Organizations: Variations In Forms Of Social Control Across Cultures. *Human Resource Management Review*, 14, 135–160.
- Gray, R., Jan B., & C. D. (2006). Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital Accounting. *Auditing and Accountability Journal*, 3(1), 319–348.
- Hart, S. L., & Milstein, M. B. (2003). Creating sustainable value. *Academy of Management Executive*, 17(2), 56–67.
- Indonesia, K. K. R. (2021). *Menkeu: Perubahan Iklim, Isu Penting dalam Pertemuan G-20 Mendatang*.
- Kamayanti, A. (2020). *Metodologi Riset Konstruktif Akuntansi: Membumikan Religiositas*. YRP.
- Lehman, G. (2005). A critical perspective on the harmonisation of accounting in a globalising world. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(7), 975–992. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2003.06.004>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Markevich, A. (2009). The evolution of sustainability. *MIT Sloan Management Review*, 51(1), 13–14.
- Marshall, R. S., & Brown, D. (2003). The strategy of sustainability: A systems perspective on norm thomson outfitters’ environmental stewardship initiatives. *California Management Review*, 46, 101–126.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Reke Sarasin.
- Nizar, S. & M. A. (2000). *Kamus Akuntansi*. Citra Harta Prima.
- Paranoan, S. (2015). Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman. In *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* (Vol. 6, Issue 2).
- Perrini, F., & Tencati, A. (2006). Sustainability and stakeholder management: the need for new corporate performance evaluation and reporting systems. *Business Strategy and the Environment*, 15(5), 296–308. <https://doi.org/10.1002/bse.538>
- Rosenau, P. (1992). Post-Modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions. *Princeton University Press*.
- Sawarjuwono, T. (2005). Bahasa Akuntansi Dalam Praktik: Sebuah Critical Accounting Study. *TEMA (Telaah Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 6(2).
- Sudana, I. P. (2014). Teori Strukturasi dan Akuntansi Sustainability. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2).
- Szekely, F., & Knirsch, M. (2005). Responsible leadership and corporate social responsibility: Metrics for

sustainable performance. *European Management Journal*, 23, 628–647.

Triuwono, I. (2000). *Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Metodologi Penelitian*. FE Unibraw.

Triuwono, I. (2002). *Kearifan Lokal: Internalisasi "Sang Lain" dalam Dekonstruksi Pengukuran Kinerja Manajemen*.